SYUBHAT MANHAJ: BOLEHNYA MENCERCA PEMERINTAH/PENGUASA DI WILAYAH LAIN (1)
(DA'I HALABIYUN RODJA MELEGALISASI PROVOKASI ANTAR WILAYAH)

Telah kita paparkan bukti cercaan Dua Doktor Dedengkot Halabiyun Rodja, Ali Musri dan Muhammad Arifin Badri kepada pemerintah pada makalah http://tukpencarialhaq.com/2014/04/22/inilah-hakekat-manhaj-dua-doktor-halabiyun-rodja/

Nampaknya bagi kalangan Halabiyun sikap-sikap para dedengkotnya tersebut yang ditentang oleh yang lainnya telah diajukan kepada salah seorang calon doktor Jami'ah yang bernama Sufyan Baswedan Abu Hudzaifah.

Gambar 1. Pujian terhadap Calon Doktor Halabiyun Sufyan Baswedan yang melegalilasi provokasi di wilayah lainnya

Berikut redaksional pertanyaan dan jawabannya yang menekankan tidak adanya kewajiban taat bahkan bolehnya sampaipun tingkat keharusan untuk mentahdzir, menyebutkan namanya sekalipun kepada penguasa di luar wilayahnya.

Adapun nama tertentu yang disebutkannya maka itu sama sekali bukan pembatasan karena terkait person bisa tertuju kepada siapapun diantara nama-nama para pemimpin di suatu wilayah yang mereka target/bidik.

basweidan.com/masalah-jihad-merupakan-wewenang-imam-waliyyul-amri/

hermawan - April 18th, 2014 at 6:44 am

Saya bertanya ya ustadz perihal perkara yang hangat akhir-akhir ini. Sebagian ustadz kita (diantaranya rektor stdi Jember) mengkritik dengan keras bahkan mungkin sudah sampai tahap mencela seorang yg kini menjabat sebagai gubernur sebuah kota besar yg akan dicalonkan sebagai presiden. Beliau menulis berbagai aib pejabat tersebut secara terang-terangan di status-status facebook beliau yg intinya orang tsb sangat tidak pantas menjadi pemimpin. Saya sih tidak masalah dengan sikap ustadz kita tersebut toch sang gubernur tersebut memang secara dzohir pantas disikapi demikian dan antum pun yg orang Solo tentu tahu sepak ternyang sang pejabat ini. Tapi ada ikhwah yg nampaknya kurang bisa menerima sikap tersebut dengan alasan menyalahi manhaj salaf dalam dalam menyikapi penguasa. Menurut saya ikhwah tersebut sedemikian 'sak klek' dalam memahami nukilan-nukilan para ulama dahulu yang tentunya kondisinya jauh berbeda dengan keadaan para penguasa saat ini yang tidak hanya sekuler bahkan telah terjerumus kepada beberapa ritual kejawen. Dengan demikian sikap salah satu ustadz kita yang mencela secara terang-terangan sang pejabat tersebut tidak bisa disalahkan. Pertanyaannya bagaimanakah seharusnya menempatkan nukilan-nukilan para ulama dalam kaitannya dengan kondisi saat ini yang sistem pemerintahannya jauh dari Islamy? Jazaakallahu khairan….

Abu Hudzaifah Al Atsary - April 26th, 2014 at 3:06 pm

Jokowi hanya menjadi waliyyul amr bagi warga DKI, bukan bagi seluruh Indonesia, lain halnya dengan presiden yg kekuasaannya meliputi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, selain warga DKI tidak terkena kewajiban taat kpd jokowi, baik secara syar'i maupun secara ketatanegaraan. Sehingga mereka boleh mentahdzirnya walau dengan menyebut namanya, apalagi jika dia sejak dahulu terkenal loyal (wala') kpd non muslim, dan bergelimang dgn kemuysrikan, lalu nampak jelas bhw di balik ambisinya mjd presiden tsb ada misi jahat AS, Cina, dan zionis yg ingin mengendalikan indonesia sesuai keinginan mereka. Maka menjelaskan hakikat si Jokowi adalah suatu keharusan.
mereka yg sak-klek memahami nukilan para ulama, sebenarnya tidak berdalil dengan nukilan tsb, namun berdalil dengan mengqiyaskan kondisi Indonesia dengan kondisi yg diceritakan oleh para ulama tsb. Jadi, pendapat mereka pun sangat debatable, karena qiyas itu rentan kelemahan… kalau 'illah-nya tidak sama, maka qiyas tsb tidak sah. Nah, bagaimana kita hendak menyamakan antara kondisi di Indonesia saat ini dengan kondisi di tempat dan saat para ulama tsb berfatwa demikian???

had
ersis

Gambar 2. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin di wilayah lainnya

Maka nampaklah dengan jelas dari fikrah yang disebarluaskan oleh Halabiyun Rodja di atas dalam rangka membela kawannya si doktor Halabiyun Rodja Muhammad Arifin Badri bahwa seorang warga Jember-Jawa Timur bisa, boleh atau bahkan sampai tingkat harus untuk mencerca, mentahdzir walikota atau gubernur di wilayah lainnya yang dianggapnya sebagai berwala' kepada non muslim, antek negara asing, antek kufar atau tuduhan lainnya dari berbagai kejelekan karena pemimpin-pemimpin wilayah tersebut hanya mengikat warganya saja untuk taat, sedangkan warga di wilayah lainnya tidak ada keterikatan apapun sehingga boleh baginya mencerca.

Seorang Walikota Malang, maka kewajiban taat hanya mengikat warga kota Malang saja, diluar wilayah itu maka boleh mencerca dan mentahdzirnya dengan alasan yang dia bawakan.

Gubernur Jawa Timur boleh dicerca oleh warga dari wilayah kota-propinsi lain dengan berbagai alasan yang telah dicontohkan sebelumnya karena hanya warga Jawa Timur yang terikat ketaatan kepadanya.

Demikian seterusnya walaupun pada dasarnya di masa sekarang ini yang mendalangi berbagai provokasi dari luar wilayah tersebut sebenarnya bisa saja lawan-lawan politik atau orang-orang jahat yang berada di dalam wilayah kekuasaan tersebut. Tetapi dengan "fiqih demokrasi provokasi" Halabiyun maka dia akan menggerakkan orang-orang di wilayah lainnya untuk mencerca dan menyerang pemimpin wilayahnya agar nampak tindakannya sesuai dengan aturan "syar'i" yang telah diaturnya. Tidak usah dipungkiri bahwa di masa teknologi informasi yang tak lagi mengenal batas wilayah semacam ini, provokasi dari jarak ribuan kilometer terbukti bisa sampai dan mengguncang stabilitas di wilayah yang dibidiknya.

Faktanya, fatwa Sufyan Baswedan di Madinah bisa dibaca oleh warga DKI sebagaimana cercaan Muhammad Arifin Badri dan Ali Musri di akun facebook masing-masing juga bisa dibaca dan menggerakkan komentar kawan-kawan facebooknya dari berbagai wilayah lainnya. Allahul musta'an.

Sebelum kita mengemukakan jawaban para ulama maka ingin kami tegaskan bahwa si Halabiyun Sufyan Baswedan yang melegalkan aksi provokasi antar wilayah ini adalah da'i resminya Halabiyun Rodja.

Berikut sebagian buktinya:

Gambar 3. Penampakan resmi tweeter Rodja bersama Sufyan Baswedan

Gambar 4. Penampakan resmi Rodja Bandung bersama Sufyan Baswedan

Untuk menjawab syubhat manhaj Halabiyun Rodja yang sangat berbahaya yang melegalkan sikap cercaan dan penentangan terhadap penguasa di luar wilayahnya di atas maka kami tampilkan pada bagian pertama ini penjelasan dari Asy Syaikh Ubaid Al Jabiri hafizhahullah yang kami nukil dari postingan di situs miratsul anbiya' –jazahumullahu khairan katsira- :

Asy-Syaikh al-'Allamah 'Ubaid bin 'Abdillah al-Jabiri hafizhahullah

Pertanyaan :
Sebagian pemuda mencela pemerintah yang bukan pemerintah mereka – dari negara lain – apabila aku menasehati mereka, akan menjawab bahwa "mereka itu bukan pemerintah kita". Bagaimana membantah mereka ini?

Jawab :
Aku sudah pernah mendengar (syubhat ini) beberapa bulan lalu, dinisbahkan pada salah seorang dari Najd. Aku tidak memeriksanya. Terlepas apakah penisbatan tersebut benar atau tidak, yang jelas (ucapan) tersebut adalah kesalahan pada masa ini. Karena tidak ada satu negeri pun kecuali padanya ada orang-orang jelata rendahan yang sangat mudah tersulut emosi (terprovokasi, pen).
Oleh karena itu aku berpendapat perbuatan tersebut tidak boleh, karena akan mengakibatkan banyak kerusakan. Misalnya, apabila kita mencela dan mencaci seorang pemimpin di luar negeri kita, maka orang-orang lalim, oposan, dan orang-orang nekat akan balik mencela pimpinan kita dan melakukan provokasi (untuk menjatuhkan)nya. Bisa jadi, mereka akan bergabung dengan para Khawarij dalam misi-misinya. Maka mencegah kerusakan merupakan salah satu kaidah

syar’iyyah. Kita telah merinci permasalahan ini dalam di banyak majelis. Di antaranya dalam pelajaran Taisir al-Ilah bi Syarh adillati Syuruth La-ilaaha illallah, dan yang lainnya.

Sumber: http://ar.miraath.net/fatwah/5526

Url sumber: http://miratsul-anbiya.net/2014/05/11/bolehkah-mencela-pemerintahpenguasa-negeri-lain/